

**DAMPAK SOSIALIASI PEMILU OLEH KPU KOTA SURABAYA
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILGUB JATIM TAHUN 2013
(DI KECAMATAN GAYUNGAN SURABAYA)**

Agustinus Panca N.

074254202 (PPKn, FIS, UNESA) Prince_Zelda28@yahoo.com

Hananto Widodo

0003067407 (PPKn, FIS, UNESA) Hananto.Widodo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Gubernur Tahun 2013. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh warga masyarakat Kecamatan Gayungan yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu gubernur tahun 2013. Sampel penelitian adalah 100 orang yang dipilih dengan metode *area probability* dan *cluster sample*. Teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, dan wawancara. Hasil analisis deskripsi menunjukkan bahwa untuk kegiatan sosialisasi KPU Kota Surabaya pada pemilu gubernur tahun 2013, pelaksanaannya berjalan dengan baik. Partisipasi politik masyarakat Gayungan pada Pilgub 2013 dikategorikan baik. Koefisiensi korelasi antar dua variabel dihitung menggunakan rumus *product moment*, dengan hasil 0,239 yang berada pada kategori rendah. Jika dipresentasikan diperoleh nilai sebesar 23,9% artinya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Surabaya mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Gayungan pada Pemilu Gubernur tahun 2013 sebesar 23,9%, sedangkan 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Nilai *t* hitung (1,99) > *t* tabel (1,98), dengan demikian hipotesis yang berbunyi: "sosialisasi kegiatan Pemilu oleh KPU Kota Surabaya berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Gubernur Tahun 2013" diterima.

Kata kunci : strategi sosialisasi, partisipasi politik.

Abstract

This study aims to determine the impact of socialization of the elections by the Election Commission of Surabaya against society 's political participation in the election of Governors in 2013 . Study was a descriptive study with a quantitative approach . The study population were all citizens of the District Gayungan registered as voters remain in the governor election in 2013 . In this study, using a sample area and sample groups , the study sample was 100 people registered as voters . Research instruments such as questionnaires , observation , and interviews . The results of the analysis indicate that the description for the socialization of Surabaya City Election Commission on governor elections in 2013 , its implementation is going well. Political participation in society Gayungan Pilgub 2013 well categorized . Coefficient of correlation between two variables was calculated using the formula product moment , with results that are .239 in the low category . If dipresentasikan obtained a value of 23.9 % means that socialization Commission Surabaya affect political participation in society Gayungan governor election in 2013 of 23.9 % . T value (1.99) > t table (1.98) , so the hypothesis that reads : " socialization of Elections by the Election Commission of Surabaya has no effect on the political participation of the people in the governor election in 2013 " .

Keywords : strategy socialization , political participation .

PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan pemilihan umum sembilan kali. Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil

presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilu.

Dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan baru di atas, ruang gerak partisipasi politik warga negara menjadi semakin luas. Warga negara memperoleh hak untuk memberikan suaranya dan turut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik dari tingkat daerah sampai tingkat pemerintahan. Partisipasi politik ini mencakup semua kegiatan yang sah oleh semua warga negara yang kurang lebih langsung dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilihan pejabat pemerintahan dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil. Pada kenyataannya, luasnya ruang gerak partisipasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak serta merta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam proses pemilihan umum. Hal ini terlihat dari banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Jumlah pemilih di Surabaya yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilukada Jatim 2013 ada 2.019.200 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 54,84%. Itu berarti ada 45,16% dari 2.019.200 orang yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya. Dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Timur, Surabaya merupakan kota yang paling besar jumlah orang yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Menurut keputusan KPU Provinsi Jawa Timur No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013, salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkualitas sangat ditentukan oleh proses sosialisasi terhadap semua tahapan kegiatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, aturan main Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan peran serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta partisipasi politik masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mendukung partisipasi politik masyarakat dalam pemilu hendaknya rakyat

memperoleh informasi tentang program dan tahapan pemilu.

Gatara (2009:207) mendefinisikan partisipasi politik sebagai: "Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan". Untuk mencapai partisipasi yang maksimal maka diperlukan penyebaran informasi (sosialisasi) tentang tahapan pelaksanaan pemilu kepada calon pemilih (masyarakat). Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi adalah penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program, dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

Dalam lingkup kabupaten/kota, tugas dan kewenangan sosialisasi tahapan dan kegiatan pemilu merupakan tanggungjawab KPU kabupaten/ kota. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 10, kewajiban KPU Kabupaten/ Kota "...(e) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat". Namun, pentingnya pemilu belum seutuhnya disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya seperti di Kota Surabaya. Hal ini terlihat dari indikator :

- 1) Masih banyak warga masyarakat yang tidak hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.
- 2) Masyarakat lebih cenderung bekerja dari pada menghadiri kegiatan kampanye.
- 3) Masyarakat terlihat masa bodoh dan tidak peduli terhadap penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sosialisasi pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 oleh KPU Kota Surabaya ?

2. Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gayungan dalam Pilgub Jatim Tahun 2013?
3. Apakah sosialisasi pemilu (variabel X) gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Kota Surabaya berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat variabel Y) Kecamatan Gayungan dalam Pilgub Jatim Tahun 2013?

Sosialisasi politik (*Political Socialization*) menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2005:25) adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik kepada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (1992:117) bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah para masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Definisi tersebut ditegaskan oleh David Easton dan Jack Dennis (dalam Michael Rush dan Phillip Althoff, 2005:34) yang mengatakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Almond dan Verba (1990:16) bahwa orientasi politik dan pola tingkah laku individu diperoleh melalui sosialisasi politik.

Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, asas pelaksanaan sosialisasi adalah:

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian hukum
- e. Tertib penyelenggara pemilu
- f. Kepentingan umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi dan
- l. Efektifitas

Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tujuan sosialisasi adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal, dan hasil Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih, untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013.
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi meliputi:

- a. Masyarakat umum (Publik).
- b. Remaja, Pemuda dan Mahasiswa (Pemilih Pemula).
- c. Perempuan.
- d. Pengemuka Pendapat (Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama).
- e. Pedagang, Buruh dan Kelompok Pekerja lainnya.
- f. Wartawan dan Kelompok Media lainnya.
- g. TNI/ POLRI.
- h. Partai Politik.

- i. Pengawas/Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
- j. LSM/ ORMAS.
- k. Pemilih dengan Kebutuhan Khusus (Penyandang Cacat, Penghuni LP, Pengamen, Pengemis, WTS, dan lain-lain).

Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, metode sosialisasi dan penyampaian informasi adalah sebagai berikut :

- a. Metode Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur:
 - 1) Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk; diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, pendidikan pemilih, ceramah, simulasi, cerdas cermat dan lomba penulisan karya ilmiah;
 - 2) Komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa dalam bentuk; tulisan, gambar, audio visual, website, iklan, dan lain-lain;
- b. Media dan Penyampaian Informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi:
 - 1) Media Utama: Media Cetak (Surat Kabar, Majalah, Buletin, dan lain-lain), Media Elektronik (TV, Radio, CD Room, Slide, Internet, SMS Center, Call Center, dan lain-lain).
 - 2) Media Pendukung: meliputi Poster, Brosur, Spanduk, Banner, Baliho, Stiker, Leaflet, Bookleat, Folder dan lain-lain.
 - 3) Media Tradisional: meliputi Kesenian Tradisional, dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, dan lain-lain.
- c. Rincian Bentuk Kegiatan Sosialisasi antara lain:
 - 1) Sosialisasi Media Massa
 - a) Siaran Televisi
 - Dialog Interaktif
 - Iklan Layanan Masyarakat

- Pengumuman
- b) Siaran Radio
 - Dialog Interaktif
 - Iklan Layanan Masyarakat
 - Pengumuman
- c) Internet/ Website
 - Iklan Layanan Masyarakat
 - Pengumuman
- d) Surat Kabar
 - Advertorial
 - Iklan Layanan Masyarakat
 - Pengumuman

- 2) Sosialisasi Pendukung
 - a) Pembuatan Baliho
 - b) Pembuatan Spanduk
 - c) Pembuatan Poster, Stiker, Leaf/eat, Bookleat, Banner dan lain-lain.
- 3) Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik organisasi kemasyarakatan, LSM, kelompok media, perguruan tinggi, sekolah, instansi pemerintah maupun Partai Politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur seperti gerakan demam dan sadar pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah provinsi jawa timur, deklarasi kampanye damai dan lain-lain.

Berdasarkan keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013, strategi penyampaian sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Strategi sosialisasi, meliputi:
 - 1) Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - 2) Membangun Pusat Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi

- 3) Jawa Timur dalam bentuk Public Information Center, Call Center, Website, serta Media Center,
 - 4) Membangun infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - 5) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital,
 - 6) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - 7) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
 - 8) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur;
 - 9) Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU bagi KPU Provinsi dan KPU Provinsi bagi KPU Kabupaten/Kota serta dengan stakeholder Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur; dan Wakil Kepala Daerah lainnya.
- b. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013, mekanisme sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 di tingkat kabupaten/ kota adalah sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten/ Kota
 1. KPU Kabupaten/ Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil

- Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya;
2. Pokja KPU Kabupaten/ Kota menyusun jadwal dan tempat Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten/ Kota;
3. Pokja KPU Kabupaten/ Kota melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten/ Kota dan Kecamatan, SMU/ SMK/ Madrasah Aliyah, dan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Melakukan sosialisasi melalui media massa yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota;
6. Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta tingkat Kabupaten/ Kota dalam menyebarluaskan informasi Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
7. KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring kegiatan sosialisasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerjanya.

Menurut keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, tema dan materi sosialisasi adalah:

- a. Tema sosialisasi dan penyampaian informasi
 - 1) Tema utama/ nasional Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Timur adalah “Dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Kita Wujudkan Kedaulatan Rakyat, dan Tetap Menjaga Keutuhan NKRI”.
 - 2) Tema pendukung/ lokal dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, budaya setempat dan disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

- b. Materi Sosialisasi

- 1) Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi antara lain:
 - a. Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
 - b. Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih
 - c. Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih.
 - 2) Materi Sosialisasi Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, antara lain:
 - a. Jadwal Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan;
 - b. Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi;
 - c. Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah
 - d. Provinsi dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - e. Mekanisme Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - f. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - g. Pengundian dan Penetapan nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
 - 3) Materi sosialisasi kampanye, antara lain:
 - a. Regulasi kampanye;
 - b. Jadwal kampanye;
 - c. Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Provinsi;
 - d. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
 - 4) Materi sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, antara lain:
 - a. Tata cara pemungutan suara;
 - b. Tata cara penghitungan suara;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPSS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi;
 - d. Pengumuman hasil Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
 - 5) Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Pengesahan dan Pengangkatan;
 - 6) Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasca Pemilu;
 - 7) Materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 03/kpts/kpu-prov-014/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota

- berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
 - i. Membuat Berita Acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Menyampaikan data hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP;
 - l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan atau peraturan perundang-undangan.

Visi dan Misi Lembaga Komisi Pemilihan Umum

Visi : terwujudnya komisi pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

(sumber: <http://www.kpusurabaya.go.id>)

Herbert Mc. Closky, (dalam Budiarjo,1982:1) mendefinisikan “partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”. (*The term “Political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the formation of public policy*). Sedangkan menurut Nie dan Verba dalam (Budiarjo,1982:2) menyebutkan “partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga Negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personal and/or the actions they take*).

Sedangkan Gantara (2009:207) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemilu, seperti mengikuti kampanye politik, memberikan suara, dan bekerja dalam suatu pemilihan. Budiarjo (1982:12) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Menurut Surbakti (1992:140) partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi yang diartikan sebagai keikutsertaan warga negara (rakyat) dalam

menentukan segala keputusan pemerintah yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1977:3) "Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi biasanya bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif". (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or not effective*).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah keterlibatan masyarakat dalam proses kegiatan dan tahapan pemilu seperti mengikuti/menghadiri kegiatan kampanye, terlibat dalam suatu panitia pemilihan dan memberikan suara.

Dari sisi tipologi, partisipasi politik dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif (Surbakti, 1992:142). Yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif antaralain: mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan, membayar pajak, dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi politik aktif menunjukkan kegiatan yang berorientasi pada input dan output politik, sedangkan partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif maupun partisipasi politik pasif. Kelompok ini muncul didasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut sebagai kelompok apatis atau golongan putih (golput).

Huntington & Nelson (1984:16-18) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi :

- a. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagicalon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- b. Lobby – yaitu Mencakup upaya-upaya seseorang atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik, dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. *Contacting* – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
- e. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Menurut Milbrath dan Goel (dalam Surbakti, 1999:143) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori:

- a. Apatitis, adalah orang-orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik,
- b. Spectator, yaitu berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam pemilu,
- c. Gladiator, yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik,
- d. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk konvensional.

Menurut UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pilkada adalah momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi atau keinginan rakyat. Dasar hukum dalam pelaksanaan pilkada:

1. Konstitusi RI yang sudah diamandemen tepatnya pada pasal 18 UUD 1945.
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan pemerintah RI no. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepaladaerah.

(sumber: <http://www.kemendagri.go.id>)

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif (*Descriptive Research*), menurut Sugiyono (2010:147) menyatakan bahwa: Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Ciri-ciri metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:164) adalah sebagai berikut:

- a. Memusatkan perhatian pada masalah – masalah yang ada pada suatu penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah – masalah yang bersifat aktual.
- b. Menggambarkan fakta – fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang aktual.

Fokus penelitian merupakan objek kajian yang menjadi titik perhatian kegiatan penelitian, maka focus penelitian ini adalah tentang strategi sosialisasi politik yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Surabaya pada Pilgub 2013.

Tempat penelitian adalah suatu daerah yang lokasinya digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah Kecamatan Gayungan.

Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Kecamatan Gayungan yang terdaftar sebagai pemilih pada pemilu Gubernur Jatim Tahun 2013.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Jadi sampel adalah sebagian jumlah populasi yang mewakili

populasi karena memiliki kesamaan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel wilayah dan sampel kelompok. Menurut Arikunto (2006:139) sampel wilayah adalah teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Kecamatan Gayungan yang tersebar di 4 desa yang terdiri dari pemilih pemula, panitia pemilihan, golongan profesi, tokoh masyarakat, dan pengurus ORMAS, maka peneliti menentukan penyampelan dilakukan dalam dua tahap yaitu, (1) wilayah sampel dibagi menjadi dalam 4 wilayah yaitu desa, dan (2) masing-masing kelompok sampel diambil 5 orang untuk dijadikan sebagai sampel.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas, oleh karena itu dalam penulisan ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk mendapatkan data informasi yang objektif, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka
2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil

3. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Melalui teknik ini dapat dikumpulkan data sebagai bukti untuk menjawab pokok permasalahan.

4. Kuesioner (Angket)

Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) pada responden. Teknik ini digunakan untuk mengukur sosialisasi kegiatan pemilu dan mengukur partisipasi politik.

Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini ada 2 kelompok data yang akan dianalisis, sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada bab satu sebelumnya. Dengan demikian, spesifikasi analisis data penelitian ini adalah:

1. Menentukan rentang

Cara menentukan rentang menurut Sudjana (2005:47) yaitu dengan cara skor/nilai tertinggi dikurangi skor/nilai data terendah.

a. Variabel X (Strategi Sosialisasi Kegiatan Pemilu)

Strategi sosialisasi adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pilgub.

No	Alternatif Jawaban	Bobot
1	Sangat Baik	5
2	Baik	4
3	Cukup Baik	3
4	Kurang Baik	2
5	Sedang	1

Skor tertinggi = 5 x 100 responden = 500
 Skor terendah = 1 x 100 responden = 100
 Rentang = 500 - 100 = 400
 Interval kelas = 500 : 5 = 100

b. Variable Y (Partisipasi Politik Masyarakat)

Partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu Gubernur.

Skor tertinggi = 5 x 100 responden = 500
 Skor terendah = 1 x 100 responden = 100
 Rentang = 500 - 100 = 400
 Interval kelas = 400 : 5 = 80

2. Menentukan kategori penilaian

a. Variable X (sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU)

Interval	Kategori
100,0 ≤ X ≤ 180,0	sangat rendah
180,1 ≤ X ≤ 260,0	Rendah
260,1 ≤ X ≤ 340,0	Cukup
340,1 ≤ X ≤ 420,0	Baik
420,1 ≤ X ≤ 500,0	sangat baik

b. Variabel Y (partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Gubernur)

Interval	Kategori
100,0 ≤ X ≤ 180,0	sangat rendah
180,1 ≤ X ≤ 260,0	Rendah
260,1 ≤ X ≤ 340,0	Cukup
340,1 ≤ X ≤ 420,0	Baik
420,1 ≤ X ≤ 500,0	sangat baik

3. Presentase

Dalam distribusi frekuensi, total skor kenyataan dari masing-masing item dapat dipresentasikan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100\%$$

Keterangan :

Total skor = jumlah skor kenyataan untuk masing-masing item

Skor tertinggi = skor tertinggi X jumlah respond
 = 5 X 100 = 500

Setelah semua item dianalisis maka dibuat rekapitulasi item untuk mengetahui termasuk dalam kategori apa variable tersebut, maka digunakan rumus berikut ini:

a. Variable X

$$\text{Skor rata-rata} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah item X}}$$

$$\text{Dipresentasikan} = \frac{\text{Skor rata-rata X}}{\text{skor tertinggi}} \times 100\%$$

b. Variabel Y

$$\text{Skor rata-rata} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah item Y}}$$

$$\text{Dipresentasikan} = \frac{\text{Skor rata-rata Y}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100\%$$

Tabel kriteria presentase menurut Arikunto (2006:246) adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Kriteria Presentase

Interval	Kategori
85% - 100%	Sangat Baik
69% - 84%	Baik
53% - 68%	Cukup Baik
37% - 52%	Tidak Baik
Kurang dari 37%	Sangat tidak baik

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasi antara dua variable, dimana variabel X dan Y merupakan skala interval, digunakan korelasi *product moment* yang dapat dicari dengan rumus berikut ini:

$$R_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X)(\sum Y)}}$$

(Arikunto, 2006:273)

Keterangan:

- R_{xy} = koefisien korelasi *product moment*
- ∑X = jumlah skor variable sosialisasi oleh KPUD
- ∑Y = jumlah skor variable partisipasi politik masyarakat
- ∑XY = jumlah hasil kali dari X dan Y

Selanjutnya untuk memberi interpretasi seberapa kuat hubungan antara variable X terhadap variable Y, digambarkan pada table skala likert berikut:

Tabel 1.4
Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	1 Sangat rendah
0,20 – 0,399	2 Rendah
0,40 – 0,599	3 Sedang
0,60 – 0,799	4 Kuat
0,80 – 1,000	5 Sangat kuat

(Sugiyono,2010:184)

Apabila koefisien relasi telah diperoleh, selanjutnya peneliti akan dihitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable X terhadap variable Y.

Koefisien determinasi ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

(Sudjana, 2005:244)

Keterangan :

- KD = koefisien determinasi
- r = koefisien korelasi variable bebas (X) dengan variable terikat (Y)

Sedangkan untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan digunakan rumus sebagai berikut : (sudjana, 2005:380)

$$t \text{ hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dengan kaidah keputusan sebagai berikut :

Jika t hitung > dari t table, maka pengaruh tersebut signifikan (H₀ ditolak dan H_a diterima. Jika t hitung < t table, maka pengaruh tersebut tidak signifikan (H₀ diterima dan H_a ditolak)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rangkuman rekapitulasi jawaban responden untuk variabel sosialisasi oleh panitia pemilihan kecamatan (X) dan variabel partisipasi politik masyarakat (Y), disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Rekapitulasi jawaban responden
Variabel X dan Y

Variabel	Sub variabel	Indikator	Deskriptor	Total skor	Kategori	
Sosialisasi KPU Kota Surabaya (X)	Langsung	Penyuluhan	Mengikuti penyuluhan	52 61	Baik	
		Diklat	Mengikuti diklat			
	Tidak langsung	Media massa	Membaca Koran			
			Membaca Spanduk			
		Elektronik	Membaca pamflet			
			Mendengar Radio			
Partisipasi Politik Masyarakat (Y)	Ikut pemungutan suara	Datang ke TPS dengan kesadaran sendiri	52	Baik		
		Datang ke TPS dengan ajakan orang lain	21			
	Menggunakan	Memilih				

		hak suara	Tidak memilih		
--	--	-----------	---------------	--	--

Selanjutnya dari table di atas akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu : bagaimanakah sosialisasi pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 oleh KPU Kota Surabaya? dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Mencari skor rata-rata variable X, dengan rumus :

$$\text{Skor rata-rata} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah item X}}$$

- b. Mencari presentase skor rata-rata variable X menggunakan rumus :

$$\text{Dipresentasikan} = \frac{\text{Skor rata-rata X}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100\%$$

$$\text{skor rata-rata variabel X} = \frac{5.261}{15} = 350,73$$

$$\text{dipresentasikan} = \frac{350,73}{500} \times 100\% = 70,14\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai skor rata-rata variabel X setelah dipresentasikan memperoleh nilai sebesar 70,14% yang jika dilihat pada criteria penafsiran berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat di artikan bahwa kegiatan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya sudah berjalan **dengan baik**.

Selanjutnya dari table di atas akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu : bagaimanakah partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gayungan dalam pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013? dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Mencari skor rata-rata variable Y, dengan rumus :

$$\text{Skor rata-rata} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah item Y}}$$

- b. Mencari presentase skor rata-rata variable Y menggunakan rumus :

$$\text{Dipresentasikan} = \frac{\text{Skor rata-rata Y}}{\text{Skor tertinggi}} \times 100\%$$

$$\text{skor rata-rata variabel Y} = \frac{5.211}{15}$$

$$= 347,4$$

$$\text{dipresentasikan} = \frac{347,4}{500} \times 100\%$$

$$= 69,48\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai skor rata-rata variable Y setelah dipresentasikan memperoleh nilai sebesar 69,48% yang berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat di artikan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gayungan pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 **baik**.

Kemudian untuk mengetahui koefisien korelasi antara dua variable digunakan koefisien korelasi *product moment* yang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$R_{xy} = \frac{\sum XY}{\sqrt{(\sum X)^2 (\sum Y)^2}}$$

Diketahui :

$\sum xy = 631,29$

$\sum x = 2288,59$

$\sum y = 3029,79$

$$R_{xy} = \frac{631,29}{\sqrt{(2288,59)^2 (3029,79)^2}}$$

$$= \frac{510,19}{510,19}$$

$$R_{xy} = \frac{510,19}{\sqrt{(2288,59)(3029,79)}}$$

$$R_{xy} = \frac{510,19}{\sqrt{6933947,1}}$$

$$R_{xy} = \frac{510,19}{2633,24}$$

$$R_{xy} = 0,239$$

Selanjutnya untuk memberi interpretasi seberapa kuat hubungan antara variable X terhadap variable Y, digambarkan pada table berikut:

Tabel 1.7
Pedoman untuk
Memberikan interpretasi
Koefisien korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

(Sugiyono,2010:184)

Berdasar hasil perhitungan diketahui koefisien korelasi (R) sebesar 0,239, berdasarkan tabel 4.37 diketahui berada pada kisaran 0.20 – 0.399 yang dikategorikan rendah. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah rendah.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y. Peneliti menggunakan Koefisien Determinasi, rumusnya adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

(Sudjana, 2005:244)

Keterangan :

KD = koefisien determinasi

r = koefisien korelasi variable bebas (X) dengan variable terikat (Y)

= 0,239

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,239 \times 100\%$$

$$KD = 23,9\%$$

Sehingga dapat diketahui variable X mempengaruhi variable Y sebesar 23,9%, artinya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Surabaya mempengaruhi partisipasi politik masyarakat pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 sebesar 23,9%.

Selanjutnya untuk menjawab hipotesis hubungan antara variable X dengan variable Y yang diajukan digunakan rumus sebagai berikut :

$$t \text{ hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t \text{ hitung} = \frac{0,239\sqrt{100-2}}{\sqrt{1-0,239^2}}$$

$$t \text{ hitung} = 1,997$$

Kemudian, untuk mengetahui harga t tabel dapat dilihat pada lampiran 1 dengan (n-2= 98) diketahui nilai t tabel = 1,98 sehingga dapat diketahui bahwa nilai t hitung (1,99) > t tabel (1,98), dengan demikian hipotesis yang berbunyi : *“sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur tahun 2013 (Ha)”* **diterima** dan hipotesis yang berbunyi : *“sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur tahun 2013 (Ho)”* **ditolak**.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan perhitungan uji T diperoleh T hitung 1,99 dan T table 1,98, sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung < T table. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi : *“sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur tahun 2013 (Ha)”* **diterima**. dan hipotesis yang berbunyi : *“sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur tahun 2013 (Ho)”* **ditolak**.

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,239 yang berada di kategori rendah, sedangkan hasil uji determinasi diperoleh angka 23,9% hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi KPU Kota Surabaya berpengaruh 23,9% terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 sedangkan sisanya

sebesar 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan penelitian terdahulu sosialisasi kegiatan pemilu oleh PPK Kec.Langkaplancar berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu legislatif tahun 2009. Sosialisasi kegiatan pemilu yang dilakukan PPK berpengaruh 16% terhadap partisipasi politik masyarakat. (Dedi Kusmana)

SIMPULAN

1. Sosialisasi KPU Kota Surabaya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Berdasarkan perhitungan variable sosialisasi KPU Kota Surabaya, diketahui bahwa nilai skor rata-rata variable X adalah 5261 setelah dipresentasikan memperoleh nilai sebesar 70,14% yang jika dilihat pada criteria penafsiran presentase berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat di artikan bahwa kegiatan sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya sudah berjalan **baik**.

2. Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gayungan pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013.

Berdasarkan perhitungan variable partisipasi politik masyarakat, diketahui bahwa nilai skor rata-rata variable Y adalah 5211 setelah dipresentasikan memperoleh nilai sebesar 69,48% yang jika dilihat pada criteria penafsiran presentase berada dalam kategori baik. Dengan demikian maka dapat di artikan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Gayungan pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 **baik**.

3. Pengaruh sosialisasi KPU Kota Surabaya terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013.

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai sebesar 0,239 yang berada di kategori rendah, sedangkan hasil uji determinasi diperoleh angka 23,9% hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi KPU Kota Surabaya terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 berpengaruh sebesar 23,9% sedangkan sisanya 76,1% dipengaruhi oleh faktor lain.

4. Berdasarkan perhitungan uji T diperoleh T hitung 1,99 dan T table 1,98, sehingga dapat disimpulkan bahwa T hitung < T table. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi : “sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur tahun 2013 (Ha)” **diterima** dan hipotesis yang berbunyi : “sosialisasi kegiatan pemilu oleh KPU Kota Surabaya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilu gubernur tahun 2013 (Ho)” **ditolak**.

SARAN

1. Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang harus di benahi, oleh karena itu penulis mengharap masukan untuk sempurnanya skripsi ini.
2. Peneliti menyarankan agar KPU dan agen sosialisasi pemilu lebih giat melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pemilu baik pemilu presiden, legislatif, maupun pilgub.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Almond, Gabriel. Dan Verba, Sidney. (1990). *Budaya Politik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Partisipasi dan Partai Politik (sebuah bunga rampai)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gantara, A.A. Sahid. 2009. *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Hutington. P, Samuel. Nelson, Joan. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Lipset, Seymour Martin. 2007. *Political Man Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- McClosky, Herbert. 1972. *Political Participation*. New York : The Macmillan Company.

Miles, Matew dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: universitas indonesia press

Riduan, 2009. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta

Rush, Michael dan Althoff, Philip. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Targian, Marlini. 2009. *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada*. Tesis yang tidak dipublikasikan. Diponegoro: UNDIP SEMARANG

Tim Penyusun. 2006. *Panduan Penulisan dan Penilaian Skripsi*. Surabaya: UNESA university Press.

B. INTERNET

<http://www.kpusurabaya.go.id> diakses, Kamis 12 Desember 2013 pukul 19.00 WIB

<http://www.kemendagri.go.id> , Kamis 12 Desember 2013 pukul 19.00 WIB

C. DOKUMEN

Keputusan KPU No.05/Kpts/KPU-Prov-014/2013 Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

Undang-undang No 32 tahun 2004

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum